



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI

Badan
Standardisasi dan
Kebijakan
Jasa Industri

Capaian Kinerja 2025 Dan Rencana Kinerja 2026 Satker BBSPJPI Semarang

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri



Semarang, 13 Februari 2026



Kinerja Keuangan


99,01%*

Realisasi Anggaran:

RM	Rp. 17.335.122.831,- (99,45%)
PNBP/BLU	Rp. 17.838.060.586,- (98,59%)
Total	Rp. 35.173.183.417,- (99,01%)

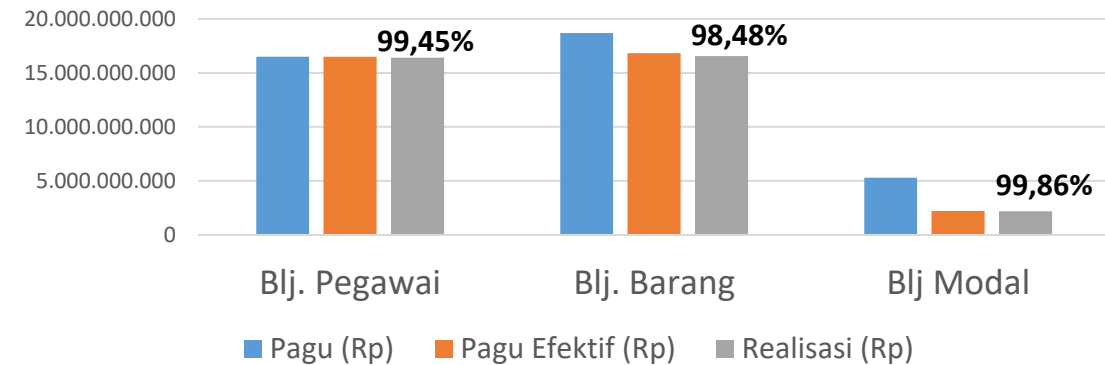
*) Total Pagu Rp. 40.465.963.000,-
Blokir Anggaran Rp. 4.942.674.000,-

Kinerja Layanan (Penerimaan PNBP)


109,62%

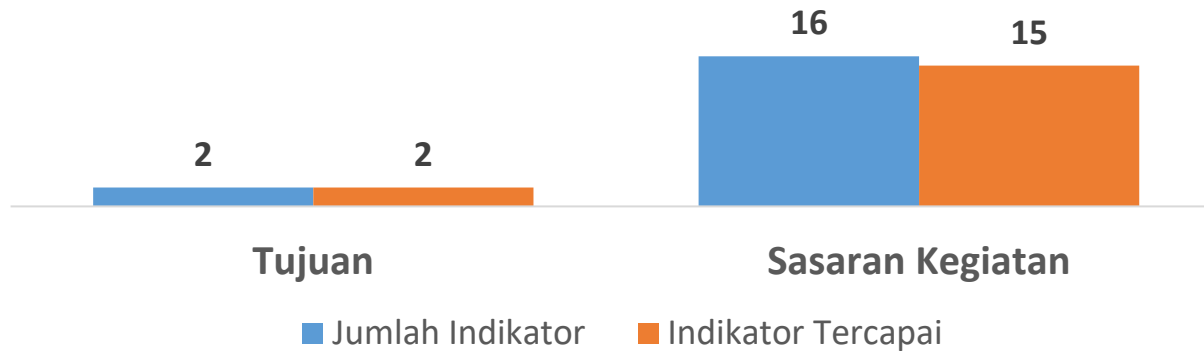

Target	Rp. 18.686.000.000,-
Realisasi	Rp. 20.483.355.953,-

Realisasi Per Jenis Belanja (Rp.)



No	URAIAN	2025
1	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	13.763.069.673
2	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.254.866.852
3	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	2.506.060.000
4	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	184.587.100
5	Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	1.096.133.500
6	Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Industri	1.237.909.000
7	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	76.548.000
8	Penyelenggara Uji Profisiensi	121.139.192
9	Penerimaan Lainnya	9.870.033
10	Pendapatan Layanan Perbankan BLU	100.198.014
11	Pendapatan Pengelolaan Aset BLU	56.250.000
12	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	76.724.589
TOTAL		20.483.355.953

Capaian indikator kinerja dari target yang telah ditetapkan pada Renstra di tahun 2025



- Indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian nilai 90,92 dari target 93,40.
- Hal ini disebabkan karena terdapat pendaftaran kontrak dengan sumber anggaran RM non inaproc yang dilakukan mendekati akhir tahun, sehingga berpengaruh pada nilai komponen distribusi akselerasi kontrak yang termasuk dalam komponen nilai belanja kontraktual pada IKPA

Kode.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Fisik			
			Target	Satuan	Realisasi	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Indeks	3,70	100,54
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	1063	110,73
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,00	Persen	94,23	107,08
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40,00	Nilai	63,00	157,50
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	Indeks	3	100
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500	Hasil Layanan	8574	114,32
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50	Persen	15,90	109,66
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	59,00	Persen	61,46	104,17
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	Indeks	83,43	102,62

Capaian indikator kinerja dari target yang telah ditetapkan pada Renstra di tahun 2025

Kode.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Fisik			
			Target	Satuan	Realisasi	
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	20,00	100,00
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	Persen	88,81	115,34
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	Indeks	4,95	107,14
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	60,00	Persen	100,00	166,67
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	70,10	Nilai	86,47	123,35
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	83,60	105,22
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,40	Nilai	90,92	97,34
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	Nilai	94,75	126,33
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00	Persen	89,79	110,85

Mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, maka tujuan BBSPJPPI ditetapkan sbb:

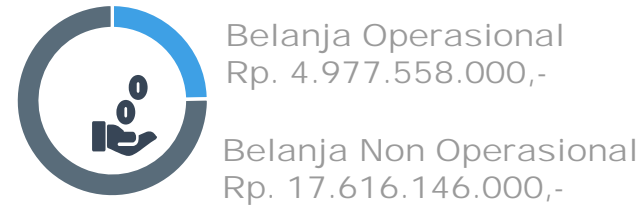
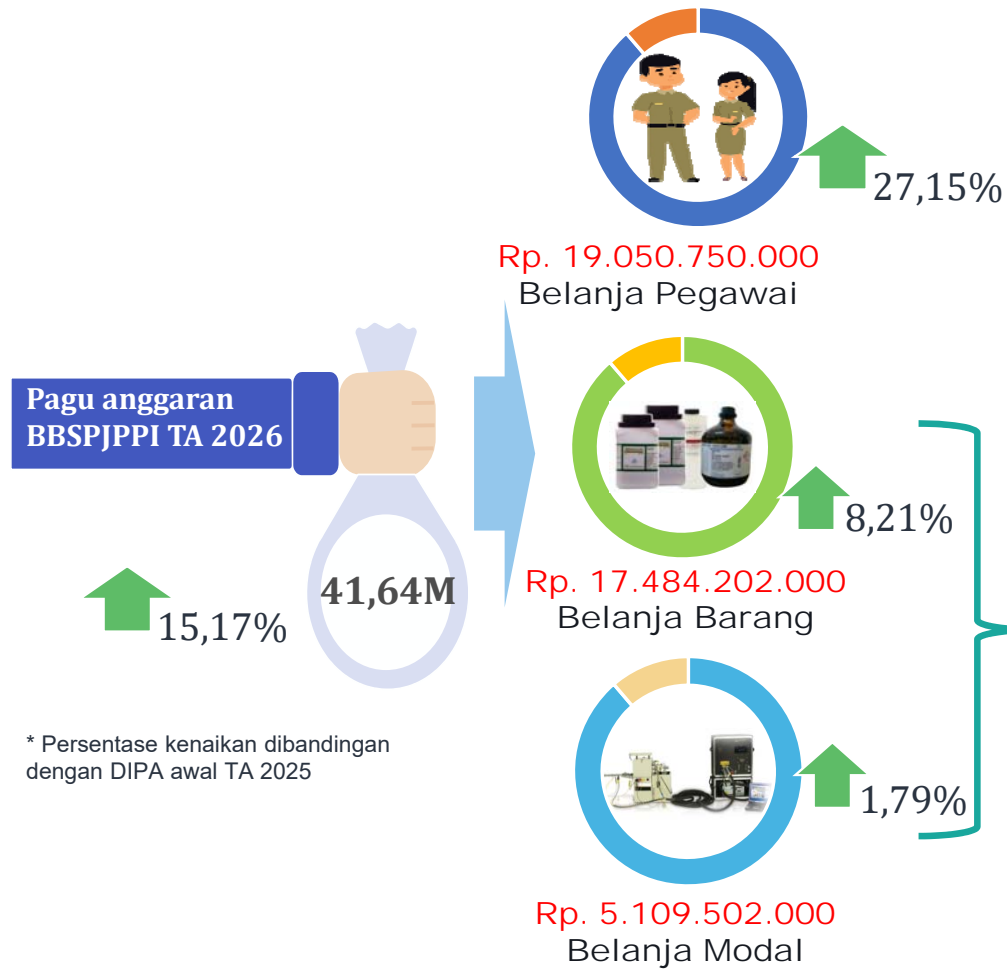
TJ	Meningkatnya dukungan standarisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator Kinerja Tujuan: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,68; 3,68; 3,69; 3,69; 3,70 (Indeks) 2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* Target 2025-2029 adalah 960; 990; 1.020; 1.060; 1.080 (Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi)

Dimana Indikator Kinerja Tujuan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI tahun 2025 – 2029

DIPA BBSPJPPI TA 2026

Blokir Anggaran:

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) memperoleh nilai efisiensi anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 sebesar **Rp. 4.457.328.000,-**



Target Penerimaan PNPB TA 2026

- Rp. 21.351.876.000,-



Komposisi Anggaran Per Jenis Belanja

* Persentase kenaikan dibandingkan dengan DIPA awal TA 2025

Rincian Pagu Anggaran BBTPPI TA 2026

Uraian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	Program Dukungan Manajemen	
	BLU (Rp)	RM (Rp)	BLU (Rp)
Blokir A Non RM	3.208.340.000	0	1.125.786.000
RO Prioritas Khusus	0	123.202.000	0
Sub Total	3.208.340.000	123.202.000	1.125.786.000
TOTAL	4.457.328.000		

Surat Sekretaris Jenderal Nomor 218/SJ-IND/PR/XII/2025 dan Nomor 219/SJ-IND/PR/XII/2025 tentang Revisi DIPA dalam rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Direktif Presiden TA 2026, DIPA BBSPJPI TA 2026 memperoleh nilai efisiensi anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 sebesar Rp. 4.457.328.000,-

Rp. 000,-

Kode	Program	Jumlah	Belanja Pegawai			Belanja Non Operasional	
			RM	RM	BLU	RM	BLU
019.WA	Program Dukungan Manajemen	26.937.719	19.050.750	582.752	4.344.835	659.076	2.177.104
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	14.829.937	-	-	-	-	14.829.937

Kode.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Fisik				
			Satuan	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.68	3.69	3.69	3.70
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	990	1.020	1.060	1.080
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	88.50	89.00	89.50	90.00
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	41	42	43	44
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	3	3	4	4
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	8,000	8,500	8,700	9,000
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	14.60	14.70	14.75	14.80
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	60	61	63	65
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.40	81.50	81.60	81.70
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	40.00	60.00	80.00	100.00
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	78.00	80.00	83.00	85.00
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.64	4.66	4.68	4,70
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	62.00	65.00	67.00	70.00
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	73.00	76.00	79.00	82.00
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79.45	79.70	79.70	80.00
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	93.40	94.00	94.00	94.50
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75.25	75.50	75.75	76.00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81.00	81.00	82.00	82.00

Kode.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	2026
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.68
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	990
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	88.50
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	41
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	3
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	8,000
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	14.60
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	60
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.40
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	40.00
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	78.00
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.64
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	62.00
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	73.00
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79.45
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	93.40
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75.25
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81.00

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Aspek Teknis Layanan	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	990 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi
		Jumlah hasil layanan jasa industri	8100 hasil layanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,7 indeks
		Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	90 %
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	15 %
2	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU	Rp. 21,351,876,000
		Peningkatan Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional	3 Indeks
		Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100 %
		Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Pembina Keuangan, Pembina Teknis, Dewan Pengawas, APIP, KAP, SPI dan BPK.	100 %
		Indeks tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening BLU	3,5 Indeks

Kode.	Tujuan/Sasaran	Strategi Pencapaian Kinerja
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar sistem mutu yang telah dimiliki secara konsisten dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa yang dihasilkan/diberikan demi kepuasan pelanggan 2. Melakukan pemeliharaan atas akreditasi sistem mutu yang dimiliki Lembaga Penilai Kesesuaian dan institusi balai sebagai jaminan mutu atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 3. Pengembangan pasar baru dan penyebaran kapabilitas layanan teknis BBSPJPPI diantaranya dengan mengintensifkan promosi dan publikasi atas kompetensi/ keunggulan jasa layanan BBSPJPPI melalui partisipasi pada kegiatan pameran dan mengoptimalkan media sosial balai 4. Pelaksanaan temu pelanggan/Business Gathering dalam rangka pemberian apresiasi kepada pelanggan loyal serta guna memperoleh umpan balik/ masukan untuk peningkatan kualitas jasa layanan BBSPJPPI
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem pelayanan satu pintu dan pengembangan sistem informasi layanan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana layanan <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi SINDli (maintenance sinkronisasi dashboard kinerja, pembuatan query data dan update database) • Pengadaan 37 unit sarana pendukung layanan (peralatan pengujian lingkungan, peralatan untuk layanan kalibrasi lingkungan (uji RCA), peralatan uji pendukung layanan uji profisiensi) • Rencana pemanfaatan saldo awal kas yang berasal dari pelaksanaan efisiensi sumber anggaran BLU di tahun 2025 untuk peningkatan kualitas layanan (pengadaan peralatan uji layanan pengujian lingkungan dan layanan kalibrasi lingkungan) dan penguatan sumber daya atau kapasitas layanan (renovasi ruang laboratorium instrumen dan pengujian limbah B3) 2. Pelaksanaan monitoring dan maintenance sarana dan prasarana secara berkala demi mendukung kelancaran operasional layanan jasa teknis

Kode.	Tujuan/Sasaran	Strategi Pencapaian Kinerja
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya perluasan kemampuan layanan melalui pengajuan perluasan ruang lingkup/jenis produk yang dapat diuji/kalibrasi/sertifikasi dan terakreditasi <ol style="list-style-type: none"> i. Rencana perluasan/penambahan ruang lingkup akreditasi untuk layanan eksisting, meliputi <ul style="list-style-type: none"> • perluasan ruang lingkup parameter SO₂, NO₂, CO, Ox, pada lingkungan kerja (Lab. Pengujian Udara, Kebisingan, dan Getaran) • perluasan ruang lingkup parameter Plankton, Benthos untuk lingkup layanan uji profisiensi ii. Pengembangan layanan baru <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Sertifikasi Personil Pada tahap awal LSP INA BBSPJPPI akan melayani sertifikasi profesi untuk lingkup 1) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air, 2) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara, 3) Penanggung Jawab Pengolahan Air Limbah, 4) Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara, 5) Pengambil Contoh Uji, 6) Penyelia Halal, 7) Auditor Halal. b. Layanan verifikasi/validasi Gas Rumah Kaca c. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (Pelatihan Penyelia Halal) BBSPJPPI akan menginisiasi pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk lingkup pelatihan penyelia halal yang terakreditasi Lembaga Akreditasi LPK Kemenaker. ii. Penjajakan kerjasama Hibah dengan Korea Conformity Laboratories (KCL) untuk kegiatan Capacity Building for Air Pollution Monitoring 2. Pelaksanaan review tarif jasa layanan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan besaran biaya operasional layanan serta penetapan tarif untuk jasa layanan baru yang belum tercover dalam peraturan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BBSPJPPI yang berlaku saat ini 3. Peningkatan sistem tata kelola keuangan di internal BLU BBSPJPPI utamanya dalam kaitannya dengan mekanisme pembayaran dan pengelolaan piutang atas penerimaan jasa layanan

Kode.	Tujuan/Sasaran	Strategi Pencapaian Kinerja
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik internal maupun eksternal untuk memenuhi standar kompetensi SDM sekaligus mendukung upaya pengembangan jasa layanan. <ol style="list-style-type: none"> i. Pengalokasian anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis ASN, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional ii. Pengalokasian anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas layanan (<i>inhouse/exhouse training</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Resertifikasi PPC Udara dan Air, Pelatihan K3 Lingkungan Kerja, Pelatihan verifikasi validasi pengujian mikrobiologi, Pelatihan sampling dan pengujian Plankton Benthos, Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015, Pelatihan Lead Auditor ISO 14001:2015, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Halal dan Penyelia Halal, Pelatihan Assesor Kompetensi, Pelatihan Penyusunan Dokumen UKL UPL dan Dasar AMDAL, Pelatihan Pemahaman ISO 17034 dan ISO 17021 2. Sosialisasi penerapan disiplin kerja pegawai
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis kebutuhan sarpras teknologi informasi untuk penerapan SPBE dan pengajuan Clearance untuk belanja terkait TIK 2. Koordinasi secara berkala dengan Pusdatin terkait pengembangan TIK 3. Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala 4. Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh pelanggan 5. Pemenuhan standar sarpras pelayanan publik

Kode.	Tujuan/Sasaran	Strategi Pencapaian Kinerja
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan waktu klarifikasi draft hasil pengawasan dengan Tim Auditor Itjen untuk memastikan point terkait temuan dan tindak lanjut yang direkomendasikan 2. Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan berserta bukti dukung sesuai batas waktu yang ditentukan 3. Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 4. Pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip 5. Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi 6. Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta 7. Peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja secara tepat waktu 2. Optimalisasi pengukuran dan monitoring kinerja secara otomatisasi melalui pengembangan dashboard kinerja 3. Membuat rencana penarikan dana bulanan dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA per Triwulan sebelum batas waktu yang ditetapkan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja secara berkala dan mendorong optimasi penyerapan anggaran 5. Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 6. Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu pada aplikasi SAKTI 7. Pelaksanaan audit atas pelaporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik

Kode.	Tujuan/Sasaran	Strategi Pencapaian Kinerja
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan2. Perencanaan oleh PPK terkait penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK pengadaan barang/jasa3. Melakukan pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan4. Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%5. Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI sesuai ketentuan



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI

Badan
Standarisasi dan
Kebijakan
Jasa Industri

TERIMA KASIH

